



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Ketut Nayaka**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **467858**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 625 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.048.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, MITSUBHISI MINIBUS EXPANDER CROSS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS HIACE Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 510.000.000

4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR N MAX Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 443.032.713

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.816.782.713

III. HUTANG Rp. 375.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.441.782.713

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.